



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 47 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 48 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/411/KEP/435.013/2022 tentang Lokasi Penutupan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Tahun 2022, Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/421/KEP/435.013/2022 tentang Lokasi Penggabungan Sekolah Dasar Negeri dan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/37/KEP/435.013/2024 tentang Lokasi Penggabungan Sekolah Dasar Negeri, perlu adanya perubahan nomenklatur dan penghapusan beberapa satuan Pendidikan pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 25);

15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 48); dan
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 48) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 10 September 2024

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

**TANGGAL : 10 September
TAHUN : 2024**

NOMOR : 47

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Kecamatan
357	SDN LENTENG BARAT II	20530041	Lenteng
358	SDN LENTENG BARAT IV	20530042	Lenteng
359	SDN LENTENG TIMUR I	20530043	Lenteng
360	SDN MEDDELAN	20530013	Lenteng
361	SDN MONCEK BARAT	20530014	Lenteng
362	SDN MONCEK TENGAH	20530015	Lenteng
363	SDN MONCEK TIMUR	20529986	Lenteng
364	SDN SENDIR	20529878	Lenteng
365	SDN GADDING I	20529525	Manding
366	SDN GADDING II	20529526	Manding
367	SDN GIRING I	20529446	Manding
368	SDN GIRING III	20529448	Manding
369	SDN GUNUNG KEMBAR	20529483	Manding
370	SDN JABA'AN I	20529485	Manding
371	SDN KASENGAN II	20529548	Manding
372	SDN LALANGON I	20529574	Manding
373	SDN LANJUK I	20529556	Manding
374	SDN LANJUK III	20529558	Manding
375	SDN MANDING DAYA I	20530072	Manding
376	SDN MANDING DAYA III	20530071	Manding
377	SDN MANDING LAOK I	20530070	Manding
378	SDN MANDING TIMUR II	20530064	Manding
379	SDN MANDING TIMUR III	20530065	Manding
380	SDN TENONAN I	20529885	Manding
381	SDN TENONAN II	20529931	Manding
382	SDN KRAMIAN II	20529616	Masalembu
383	SDN KRAMIAN III	20529617	Masalembu
384	SDN KRAMIAN IV	20529618	Masalembu
385	SDN MASAKAMBING	20530068	Masalembu
386	SDN MASALIMA I	20530069	Masalembu
387	SDN MASALIMA II	20530081	Masalembu
388	SDN MASALIMA III	20529975	Masalembu
389	SDN MASALIMA IV	20529987	Masalembu
390	SDN MASALIMA V	20529988	Masalembu
391	SDN SUKAJERUK I	20529814	Masalembu
392	SDN SUKAJERUK III	20529815	Masalembu
393	SDN SUKAJERUK VI	20529816	Masalembu
394	SDN NONGGUNONG I	20529977	Nonggunong
395	SDN PULAU PAJANGAN	20530031	Nonggunong
396	SDN ROSONG	20530112	Nonggunong
397	SDN SOKARAMME TIMUR I	20529884	Nonggunong
398	SDN SOKARAMME TIMUR II	20529799	Nonggunong
399	SDN SOKARAMME PASESER I	20529870	Nonggunong
400	SDN SOKARAMME PASESER II	20529871	Nonggunong
401	SDN SOKARAMME PASESER III	20529872	Nonggunong
402	SDN SOMBER	20529811	Nonegunone